



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

ZONA INTEGRITAS

— DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL —

SIAP MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

“ Dengan jiwa dan semangat reformasi birokrasi kita dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE
Plt Dirjen Kekayaan Intelektual





Untuk Perencanaan TI Yang Akuntabel dan Berintegritas, DJKI Membahas Implementasi IT Master Plan 2020-2024

Bogor – Hotel Royal Safari Garden, tanggal 16 Juni 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) membahas Implementasi *IT Master Plan* (ITMP) 2020-2024 melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

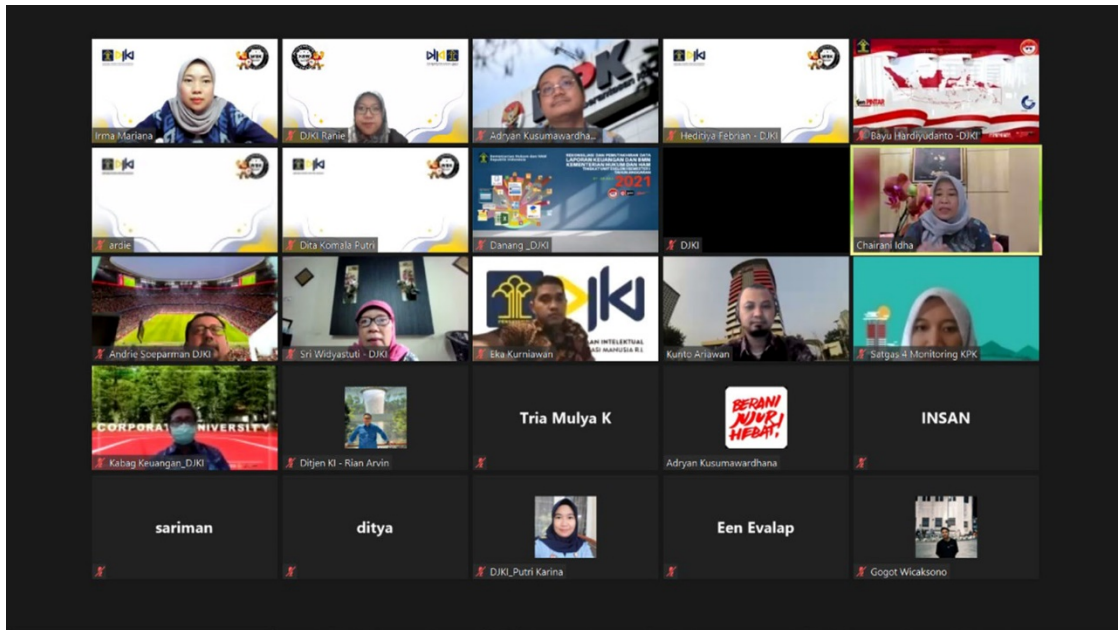
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi *IT Master Plan 2020-2024*, Perencanaan Teknologi Informasi (TI) Yang Akuntabel dan Berintegritas.

Adapun arahan Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Sucipto menyampaikan bahwa salah satu langkah menuju pemetaan jalan pembangunan teknologi informasi untuk reformasi digital pelayanan publik, haruslah memiliki komitmen dan inovasi yang dimulai

dengan perencanaan yang baik.

“Bicara mengenai data, data harus aman. Menjamin data merupakan bagian dari pelayanan prima yang luar biasa. Karena data merupakan nilai ekonomi dan menjaga stabilitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi,” ujar Sucipto.

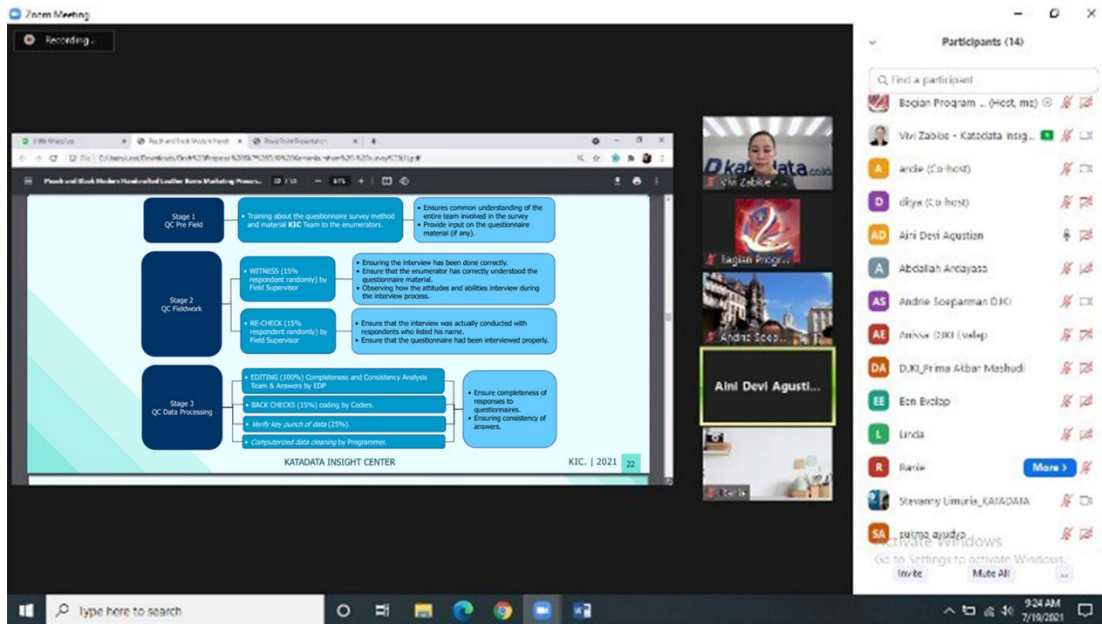
Sebagai tambahan, Sucipto juga mengupas tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Hukum dan HAM perlu mengimplementasikan Filosofis Jawa 5T (Toto, Titi, Titis, Tatas, dan Tutug).



Untuk Perencanaan TI Yang Akuntabel dan Berintegritas, DJKI Membahas Implementasi IT Master Plan 2020-2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam hal ini Sekretariat DJKI melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/7/2021). Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Kajian Monitoring yang telah dilaksanakan KPK terhadap Tata Kelola Pelayanan KI pada DJKI.

Adapun tujuan dari FGD ini adalah memetakan dan mengidentifikasi potensi korupsi yang pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengelolaan layanan di kemudian hari.



Persiapan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Dasar Evaluasi Kualitas Pelayanan DJKI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menjalankan survei kepuasan masyarakat secara kontinu dan masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Survei ini menjadi program berkelanjutan yang berfokus pada pencapaian indeks target dan perbaikan layanan yang sesuai harapan publik. DJKI dengan pihak ketiga melakukan koordinasi dalam rangka persiapan survei tersebut melalui aplikasi zoom pada hari Senin, 19 Juli 2021.

Survei kepuasan pelanggan ini diharapkan dapat membantu DJKI untuk mengetahui kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kualitas pelayanan yang selama ini diberikan. Serta, untuk mengetahui prioritas pelayanan yang perlu menjadi konsentrasi utama dalam perbaikan.

Sebagai manfaatnya, diharapkan hasil survei ini nantinya dapat memudahkan DJKI dalam mengambil strategi kebijakan perbaikan layanan. Sehingga, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat menjadi bagian dari keberhasilan kinerja penyelenggaraan program pemerintah.



Wujudkan Pelindungan Maksimal, DJKI Janjikan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara KI

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan pertemuan secara daring untuk membahas penyusunan Permenkumham tentang Manajemen Penyidikan di bidang Kekayaan Intelektual melalui aplikasi zoom, Kamis, 5 Agustus 2021.

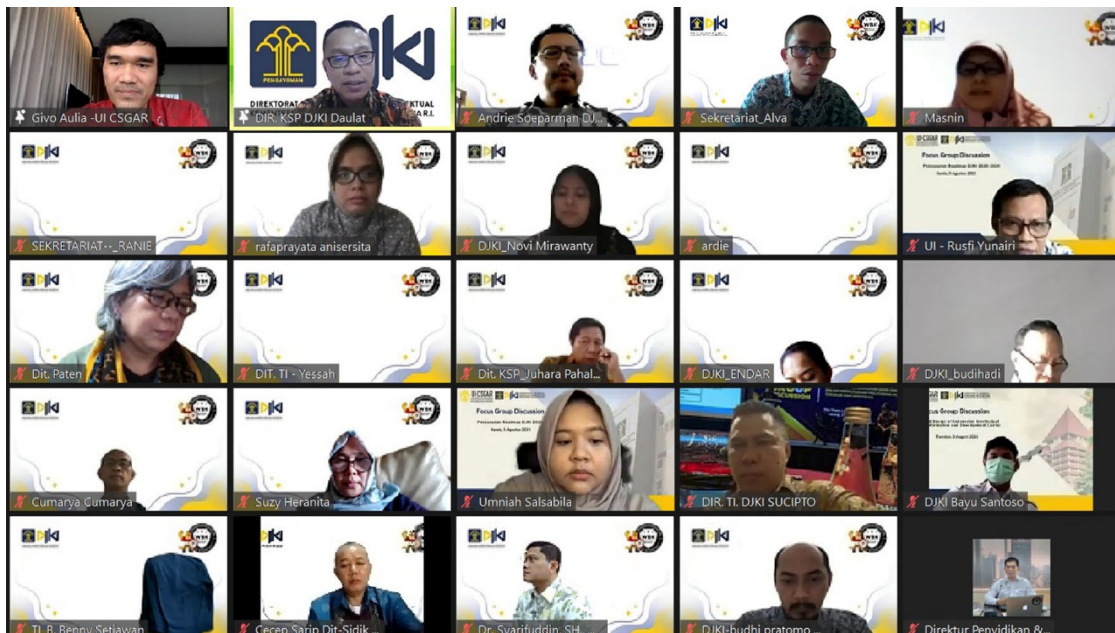
Dalam rapat kali ini, fokus bahasannya adalah Pasal 10 terkait administrasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik).

Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya. Tujuannya untuk menentukan apakah suatu aduan merupakan tindak pidana atau bukan.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa membuat terobosan dalam menyelesaikan pelaksanaan penyidikan yaitu dengan penentuan skema klasifikasi perkara mudah, sedang, dan berat.

Tujuan dibuatnya Rancangan Permenkumham tentang Manajemen Penyidikan di bidang KI ini salah satunya ialah memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara KI.



Penyusunan Roadmap DJKI Bahas Beberapa Isu Strategis

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform menggelar *Focus Group Discussion* penyusunan peta jalan (*roadmap*) DJKI secara virtual pada Kamis, 5 Agustus 2021.

Ada beberapa isu strategis yang dibahas pada diskusi kali ini diantaranya, Pertama, Penguatan kekayaan intelektual (KI) bagi masyarakat/ pelaku ekonomi kreatif yang memiliki KI seperti melakukan edukasi terkait dengan kegunaan KI, lisensi, jaminan dan branding.

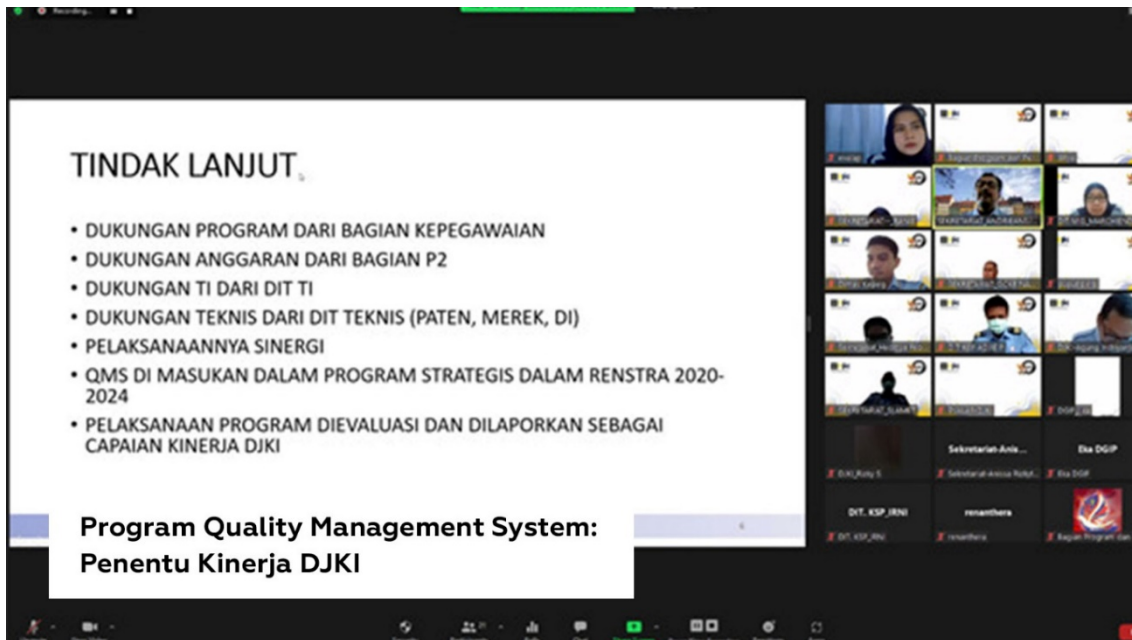
Kedua, diperlukan adanya kolaborasi percepatan potensi ekonomi di 33 wilayah untuk melihat kembali dari sisi pemulihan ekonomi, mana saja KI Komunal (KIK) yang

bisa diupayakan untuk pemberdayaan ekonomi.

Ketiga, pengembangan pusat data nasional KIK, meliputi inventarisasi dan pencatatan KIK. Di mana perlu dilakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga lain dalam rangka penguatan ekosistem KI.

Keempat, disusunnya RUU Fidusia dengan perlu disusunnya skema pembiayaan bagi UMKM dan pelibatan perbankan, di mana surat pencatatan dan sertifikat KI dapat dijadikan sebagai jaminan.

Diharapkan rapat penyusunan roadmap DJKI ini dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis DJKI yang telah dibuat sebelumnya.



Program Quality Management System: Penentu Kinerja DJKI

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam hal ini Sekretariat, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI (Dit. KSP) serta perwakilan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI menggelar Rapat Koordinasi Pelatihan *Quality Management System* (QMS) untuk Pengembangan Pegawai DJKI melalui aplikasi zoom, Senin (9/8/2021).

Pembahasan mengenai program QMS penting dilakukan karena memiliki dua sasaran utama yakni Kualitas Layanan yang sekaligus menunjang DJKI untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menjadi *The Best IP Office in The World*.

Dalam pelaksanaannya, modul petunjuk teknis, pelatihan non tradisional yang bersifat implementatif dan aplikasi perlu diadakan sebagai penunjang program QMS.

Oleh sebab itu, program ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari Direktorat Teknis, Sekretariat, Dit. KSP serta Direktorat Teknologi Informasi KI DJKI.

Nantinya, Pelaksanaan program QMS akan dievaluasi dan menjadi laporan capaian kinerja DJKI.



DJKI Ikuti Penguatan Zona Integritas Menuju WBK WBBM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti rapat virtual kegiatan penguatan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham pada hari Selasa, 10 Agustus 2021.

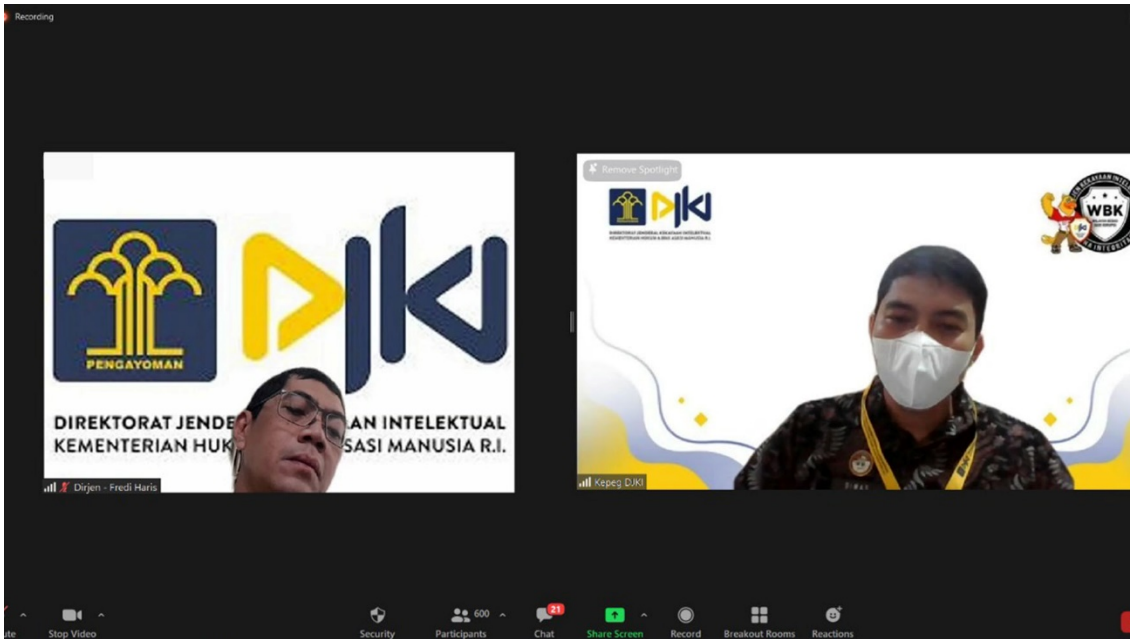
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.

Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas

sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.

“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.

Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yaitu Core Values BerAKHLAK.



Dirjen KI Dorong Pegawai untuk Meningkatkan Kapasitas Diri

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kapasitas diri baik dengan mengambil program pendidikan formal maupun informal.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan sosialisasi terkait beasiswa dari Kepegawaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu, 19 Agustus 2021 melalui Zoom Meeting.

"Saya sangat mendukung revolusi mental. Kita harus bangun Sumber Daya Manusia (SDM) kita karena buat apa memiliki jabatan saja? Pendidikan soft skill maupun formal juga penting," ujar Freddy.

DJKI sebagai bagian Kemenkumham saat ini tengah membangun program program beasiswa guna memberikan fasilitas pengembangan diri pada pegawai. Pada beberapa tahun mendatang, Freddy berharap program ini akan menjadi investasi untuk memperbaiki DJKI dalam melayani masyarakat.

Program tersebut juga merupakan bagian program area perubahan yang dicanangkan Dirjen KI di awal kepemimpinannya. Tujuannya adalah menjadikan DJKI sebagai kantor KI Terbaik di Dunia.



DJKI Lakukan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham Melalui Konsinyasi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Kegiatan Konsinyasi Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham di Hotel Mercure Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.

“Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan guna menyelesaikan kendala dan permasalahan yang masih terjadi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, sehingga persoalan temuan terhadap DJKI dapat ditindaklanjuti dan terselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal,” ujar Sekretaris DJKI Chairani Idha.

Idha juga menyampaikan bahwa DJKI berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja melalui penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dengan membangun Sistem Pengendalian Akuntabilitas Laporan Keuangan Kekayaan Intelektual atau IPROFINE.

Dengan adanya kegiatan diharapkan rekomendasi temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal dapat terselesaikan dengan baik. Mengingat penyelesaian rekomendasi tersebut menjadi faktor penting dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Tingkatkan Kualitas Layanan, DJKI Adakan Penyempurnaan Bisnis Proses Pendaftaran Desain Industri

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Penyempurnaan Bisnis Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri di Hotel Westin, Jakarta pada 8-10 September 2021.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis elektronik khususnya pendaftaran desain industri.

Sejak IPROLINE di-*launching* untuk memproses layanan di bidang kekayaan intelektual pada tanggal 17 Agustus 2019, pelayanan elektronik pendaftaran desain industri mengalami transisi dari yang

semula berbasis manual menjadi layanan berbasis elektronik.

Syarifuddin, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dalam sambutannya menyatakan bahwa transisi layanan ini membutuhkan proses dan perlu terus dikembangkan untuk penyempurnaannya.

Harapannya, kegiatan ini akan menghasilkan 2 output, yaitu dokumen alur proses penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri yang akan dijadikan panduan penyusunan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) dan standar layanan berbasis elektronik.



Tingkatkan Maturitas SPIP, DJKI Selenggarakan Penguatan Mitra Kerja Sama dan Sosialisasi New SPIP

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Penguatan Mitra Kerja Sama oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Sosialisasi New Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (New SPIP) di lingkungan DJKI di Aula Oemar Seno Adjie lantai 18 Gedung Ex-Sentra Mulia pada hari Rabu, 8 September 2021.

"SPIP harus dibangun pada setiap tingkatan dan jenjang birokrasi, dengan harapan akan memberikan jaminan kualitas kinerja pada keseluruhan tingkatan dan jenjang birokrasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris pada sambutannya.

Freddy menegaskan bahwa DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham terus berusaha mewujudkan SPIP yang kuat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pencapaian nilai maturitas yang meningkat setiap tahunnya.

"Tahun ini kami melakukan sebuah terobosan pelaksanaan Evaluasi Kinerja (Evkin) yang mendukung peningkatan maturitas SPIP di lingkungan DJKI melalui evkin virtual yang diikuti oleh seluruh keluarga besar DJKI. Ini menjadi langkah besar bagi kami untuk dapat melakukan pengendalian internal sebagai upaya meminimalisir permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja DJKI," ujar Freddy.



DJKI Bersama Bareskrim Polri Persiapkan Perjanjian Kerja Sama Pelindungan dan Pemberdayaan KI

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus bersemangat dalam upaya mengeluarkan Indonesia dari daftar negara pelanggar Kekayaan Intelektual (KI) cukup berat atau biasa dikenal dengan *priority watch list* (PWL) menurut United States Trade Representatives (USTR).

Atas dasar tersebut, DJKI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pelindungan dan Pemberdayaan KI bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) pada Jumat (1/10/2021) di Hotel Westin, Jakarta.

Menurut Daulat P Silitonga selaku Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, koordinasi dan penyamaan persepsi

antarinstansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang KI merupakan salah satu kunci utama untuk menanggulangi pelanggaran KI di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo sependapat dengan hal tersebut, bahwa kerja sama antar lembaga sangat diperlukan untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL.

“Saya berharap dengan kerja sama ini, dalam waktu dekat Indonesia dapat turun dari status PWL ke status *Watch List* (WL) di bulan Maret 2022 atau bahkan keluar dari PWL,” ujar Anom.



DJKI Semangat Reformasi Birokrasi untuk Tingkatkan Kualitas Kinerja

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kualitas birokrasi yang berorientasi kepada kemudahan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektur Jenderal Kemenkumham (Irjen Kemenkumham) Razilu mengatakan bahwa DJKI harus membangun zona integritas yang *zero penyimpangan*, *zero penyelewengan* dan *zero complaint*.

“Di DJKI tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan zona integritas,” kata Razilu saat membuka kegiatan

FGD Semangat Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja di Masa Pandemi pada Rabu, (6/10/2021) di Hotel The Westin Jakarta.

Razilu berpendapat bahwa agar DJKI dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu adanya pengendalian internal.

Ia merekomendasikan untuk melaksanakan penilaian risiko korupsi dalam seluruh tahapan pelayanan KI, menguji sistem pengendalian internal terhadap pemenuhan standar pelayanan, menyusun dan melaksanakan mekanisme penegakan kepatuhan, serta mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran kepatuhan.



Perkuat Komitmen, Dirjen KI: Terus Lakukan Penyesuaian Standar Layanan Prima

Bogor – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris memberikan penguatan kepada pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada acara Evaluasi Standar Layanan Permohonan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berbasis Elektronik di Hotel Amaroossa Bogor, Jawa Barat, Jumat, 22 Oktober 2021.

Freddy mengatakan bahwa DJKI harus terus berupaya memperbaiki pelayanan publik, terutama dalam permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis.

“Namun demikian, kondisi sumber daya manusia yang belum mumpuni maupun era digitalisasi saat ini menjadi faktor yang harus menjadi fokus utama,” ujar Freddy.

Penyesuaian terhadap standar layanan kekayaan intelektual tentunya perlu disesuaikan dengan rekomendasi kementerian lembaga terkait, serta penyesuaian proses bisnis berbasis elektronik saat ini terus dilakukan.

Harapannya, evaluasi ini dapat menghasilkan perbaikan sistem kekayaan intelektual yang kuat dan dinamis. Serta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.



Empat Poin Penting Menuju Kantor Kekayaan Intelektual Berkelas Dunia

Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menginstruksikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat rencana kerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kekayaan intelektual (KI) yang memudahkan masyarakat serta bebas dari praktik pungutan liar.

Razilu mengatakan ada empat poin penting yang harus di jalankan DJKI, yaitu, Pertama, menyelesaikan target kinerja DJKI secara terukur. Kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk publik.

Ketiga, menjaga tata kelola pemerintahan DJKI agar tetap akuntabel, transparan, dan berintegritas. Keempat, memberikan

layanan terbaik dalam perlindungan kekayaan intelektual (KI).

"Rencana kerja 2022-2024 ini sebagai target DJKI menuju *world class IP office*," kata Razilu di Aula Kantor DJKI, Kamis, 28 Oktober 2021.

Terkait pelayanan publik, Razilu meminta DJKI untuk dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai standar peraturan perundangan dan pedoman standar layanan.

Razilu juga mengajak seluruh jajaran DJKI untuk memiliki sistem manajemen anti penyuapan sebagai upaya menghindari terjadinya korupsi.



Perkuat Sinergitas, Plt. Dirjen KI Berikan Arahan Kepada Pimpinan di Lingkungan DJKI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan rapat internal paparan strategis, sistem, dan evaluasi kinerja dengan analisis *strengths, weakness, opportunities, threats* (SWOT) dari setiap direktorat di lingkungan DJKI pada 22 November 2021 di ruang rapat Lt.18 gedung Eks-Sentra Mulia.

Adapun setiap direktur dan pimpinan lembaga di bawah DJKI memaparkan analisa SWOT mereka dalam menjalankan janji kerjanya kepada Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Razilu.

Berdasarkan dari paparan yang telah disampaikan, Dirjen KI Razilu memberikan arahan kepada semua unit Eselon II DJKI harus sudah menyusun belajar terstruktur

dengan materi yang terstruktur untuk rencana kinerja kedepan.

“Jika materi teknis dirasa perlu diikuti oleh stakeholder atau konsultan KI silakan dilakukan secara hybrid. Kenapa itu perlu dilakukan dengan orang luar atau stakeholder,” tutur Razilu.

Dia melanjutkan, bahwa menurutnya pemahaman terkait KI di masyarakat masih kurang sehingga usaha untuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat harus intensif dilakukan.

Hal ini dilakukan agar para pimpinan maupun akademisi serta masyarakat benar - benar memahami KI.



Ulasan Baik Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Ditjen Kekayaan Intelektual

Jakarta - Untuk memanjakan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai serba-serbi kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menghadirkan terobosan-terobosan inovatif terkait layanan informasi.

Beragam layanan informasi yang dimiliki DJKI diantaranya adalah Call Center 152, Live Chat, Email, Siviki, dan kanal media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, serta Youtube.

Dengan banyaknya pilihan kanal informasi tersebut, masyarakat bebas memilih kanal yang sesuai dengan kenyamanan penggunaannya.

Seperti pada layanan Siviki yang merupakan layanan *video conference*, masyarakat dapat melakukan konsultasi KI tatap muka secara virtual dengan agent.

Tidak hanya itu, kanal informasi lainnya juga tetap beroperasi memberikan konsultasi layanan informasi maupun menerima pengaduan layanan setiap hari kerja pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Alternatif lainnya, yaitu melalui media sosial DJKI. Di mana media sosial ini selalu aktif dan responsif, tidak hanya memberikan layanan konsultasi maupun pengaduan layanan saja. Namun, DJKI juga memberikan edukasi.



Plt Dirjen KI Minta Pegawai DJKI Sukseskan Tahun Hak Cipta 2022

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu menyampaikan program-program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2022 pada 4 Januari 2022 di Gedung Sentra Mulia, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

“Kami perlu menyampaikan bahwa Tahun 2022 akan menjadi Tahun tematik bagi Hak Cipta, maka marilah kita sama-sama menyukseskan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta melalui dukungan atas program dan kegiatannya,” ujar Razilu pada Rapat Koordinasi Program Unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut.

Adapun program yang dijelaskannya antara lain kunjungan Menteri Hukum dan

HAM dalam Roving Seminar Menkumham di 6 wilayah yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Bali dan Jawa Timur. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan Menkumham untuk bertemu dengan kepala daerah setempat dan membicarakan persoalan kekayaan intelektual khususnya merek, kekayaan intelektual komunal hingga indikasi geografis.

Selain itu, DJKI akan melaksanakan program DJKI Aktif Belajar dan Mengajar pada 2022. Kegiatan ini membutuhkan silabus pengajaran yang rencananya akan disusun oleh masing-masing direktorat. Kegiatan ini bisa bersifat internal maupun melibatkan peserta eksternal.



Awali Kinerja Terbaik di Tahun 2022, DJKI Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat DJKI dan Direktorat Teknologi Informasi KI (Dit. TIKI) 2022 di Aula Oemar Seno Adji, pada Senin, 24 Januari 2022.

“Penandatanganan perjanjian kinerja ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sehingga Para Pejabat yang melakukan tanda tangan melakukan pekerjaan dengan hati-hati sesuai aturan yang ada,” jelas Plt. Sekretaris DJKI sekaligus Direktur Dit. TIKI Sucipto.

Selanjutnya, Ia mengungkap dengan adanya komitmen tersebut bisa membantu DJKI dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan

menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Ayo bersama-sama membangun DJKI dengan keterbukaan dengan mengedepankan tertib administrasi, tertib substansi dan tertib hukum,” ujar Sucipto.

Menurutnya, janji kinerja, khususnya bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku yang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu membaca dengan cermat dan teliti dokumen-dokumen pengadaan.



Cegah Pelanggaran Tindak Pidana, DJKI Lakukan Pembentukan Whistleblowing System

Jakarta - Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Sesditjen KI) Sucipto menyebut bahwa sistem whistleblowing perlu dibentuk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai sarana untuk melakukan penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu di lingkungan kerjanya.

"Ini juga penting untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," ujar Sucipto saat membuka kegiatan sosialisasi pembentukan *whistleblowing system* (WBS) secara daring, Senin 21 Februari 2022.

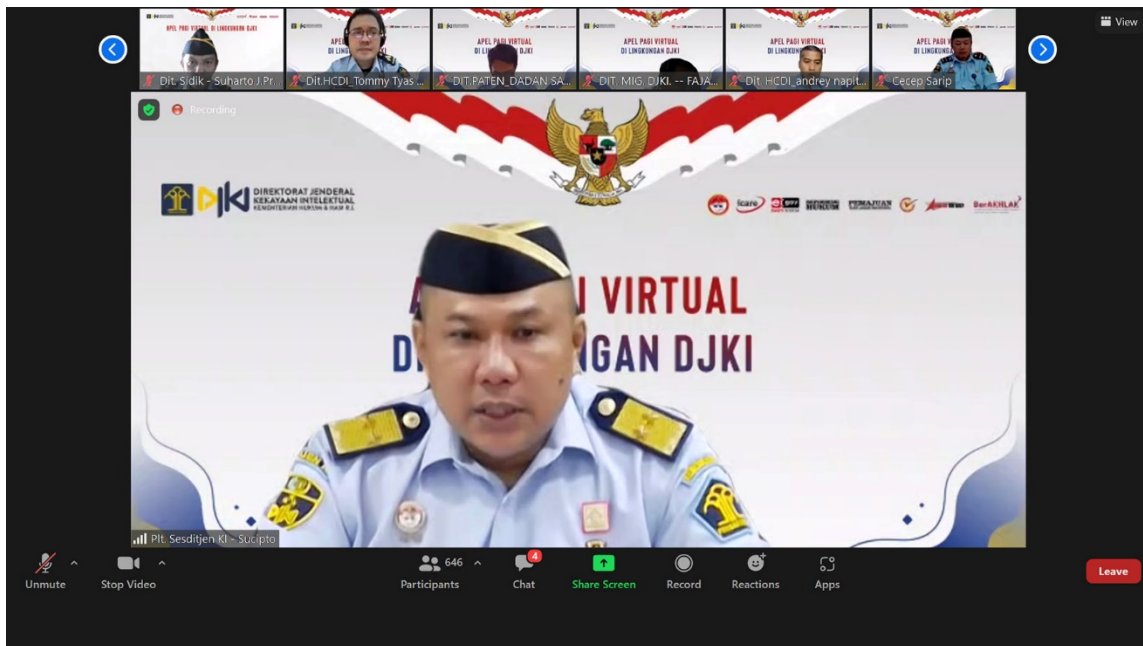
Dalam kesempatan yang sama, hadir Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Tholib menyampaikan materi seputar WBS.

Menurutnya, WBS adalah aplikasi kanal pengaduan yang dapat diakses oleh pegawai maupun masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran kode etik, disiplin pegawai maupun pelanggaran lainnya di lingkungan Kemenkumham.

"Fungsi dari wbs itu adalah menghentungan dari pada pelanggaran yang terjadi dalam proses suatu organisasi," ucap Tholib.

Dengan adanya sosialisasi pembentukan WBS ini diharapkan dapat membantu DJKI mewujudkan pembangunan zona integritas.



Plt. Sekretaris DJKI Beri Penguatan Demi Realisasi Target Kinerja dan Predikat WBBM

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengadakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai secara virtual melalui aplikasi Zoom, Senin, 21 Februari 2022.

Pada kesempatan kali ini Pelaksana Tugas Sekretaris DJKI Sucipto yang berlaku sebagai pembina apel memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai yang hadir. Dia mengingatkan para pegawai untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan di manapun bekerja.

Dalam amanatnya, Sucipto mengungkap bahwa realisasi anggaran DJKI hingga saat ini masih belum maksimal.

“Saya menghimbau seluruh rekan-rekan untuk meninjau kembali terkait rencana kegiatan dan kegiatan yang terdata supaya pada target kinerja bulan ketiga kita bisa mencapai angka 25%”, ujar Sucipto.

Selanjutnya, demi terwujudnya Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah DJKI, Sucipto juga mengingatkan pihak terkait untuk segera mengumpulkan data dukung yang dibutuhkan sebelum 16 maret 2022.

“Hari ini ada kegiatan sosialisasi pembentukan Whistle Blowing System. Mohon untuk diikuti seluruh pegawai karena juga berkaitan dengan capaian WBBM tersebut.” Pungkas Sucipto.



DJKI Dukung Tercapainya Good Governance Serta Reformasi Birokrasi

Jakarta - Dalam rangka terus mendukung dan mencapai good governance serta reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Sosialisasi Disiplin Pegawai serta Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai pada Selasa, 1 Maret 2022 melalui aplikasi Zoom.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai khususnya di lingkungan DJKI agar meningkatkan kinerja serta tugas dan fungsi pegawai sehari-hari serta memahami disiplin dan kode etik pegawai,” ujar Dian Nurfitri selaku Koordinator Kepegawaian saat membacakan sambutan Plt. Sekretaris DJKI.

Adapun disiplin pegawai dan kode etik pegawai merupakan pedoman yang perlu dan harus ditaati untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas pegawai yang ada pada setiap institusi pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat membantu DJKI meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta sebagai wujud nyata DJKI dalam melaksanakan reformasi birokrasi, serta menjadikan DJKI sebagai *“World Class IP Office”*.



Entry Meeting PMPRB, DJKI Siap Berbenah

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus membenahi diri, salah satunya melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Kegiatan entry meeting PMPRB di lingkungan DJKI oleh Inspektorat Wilayah V, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham ini dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi Zoom dan secara langsung di Aula Oemar Seno Adji, pada Rabu, 2 Maret 2022.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DJKI, Sucipto penilaian mandiri ini merupakan kegiatan yang sangat penting,

serta harapannya tim penilai dari Itjen dapat memberikan petunjuk perbaikan untuk DJKI agar dapat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan dirasakan manfaatnya untuk khalayak ramai.

“Penilaian mandiri ini sangatlah penting, kami berharap Bapak Inspektur Wilayah beserta tim Penilai itjen dapat memberikan arahan apa saja yang dapat kita jalankan dengan baik, sehingga WBBM dapat disandang oleh DJKI sehingga dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh khalayak,” harap Sucipto.



o Adji, 7 Maret 2022

Dukungan Seluruh Pegawai Bisa Antarkan DJKI Wujudkan WBBM

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan apel pagi secara hybrid di Aula Seno Adji lantai 18 Gedung Ex. Sentra Mulia dan melalui aplikasi Zoom, Senin, 7 Maret 2022.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sucipto menyampaikan amanat apel. Dalam amanatnya ia membahas beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh Pegawai DJKI.

Dalam rangka implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi (RB), Sucipto mengungkapkan bahwa para Pimpinan Tinggi Pratama telah berkomitmen untuk bersinergi dan bekerja sama demi terwujudnya zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan DJKI.

“Saat ini Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sedang berlangsung. Butuh dukungan dari segenap unsur di lingkungan DJKI untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan Indeks RB yang selalu kita raih dengan nilai yang sangat memuaskan,” tegasnya.



Mewujudkan Sistem Layanan Prima, DJKI Gelar Workshop Data Driven

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly berkomitmen penuh dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan infrastruktur pelayanan publik berbasis digital.

Hal ini sejalan dengan misi Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam menjadikan DJKI sebagai kantor kekayaan intelektual (KI) berkelas dunia.

Oleh karena itu, DJKI menggelar kegiatan Workshop Data Driven dengan tema Pelayanan Publik KI Berbasis Digital Melalui Data dan Fakta yang Akurat dan Integritas terhitung sejak tanggal 7 s.d. 10 Maret 2022 di The Rinra Hotel, Makassar.

“Meningkatnya jumlah akses yang dilakukan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka dibutuhkan suatu sistem yang andal dan dapat bekerja secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional,” ujar Sucipto selaku Sekretaris DJKI saat membuka kegiatan pada Selasa, 8 Maret 2022.

Saat ini, DJKI terus melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi baik *hardware* seperti data center, server jaringan serta *software* yaitu aplikasi *online*.



Direktur HCDI: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Dengan Memberikan Pelayanan Publik Terbaik

Jakarta - Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti apel pagi virtual melalui Zoom Cloud Meeting pada Senin, 14 Maret 2022.

Bertindak sebagai pembina apel, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai DJKI untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kinerja khususnya pelayanan publik.

"Terus tingkatkan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ungkapnya.

Anggoro beranggapan bahwa dengan memberikan pelayanan publik terbaik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DJKI sehingga dapat membangun birokrasi yang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional serta mendukung program unggulan DJKI menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia.

Selain itu, terkait dengan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, ada beberapa layanan yang bersifat internal perlu dikembangkan untuk menjadi inovasi baru.



Plt Dirjen KI: Amalkan Janji Kinerja yang Telah Diucapkan

Jakarta – Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu maupun Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Senin, 21 Maret 2022 di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia Jakarta Selatan.

Adapun pejabat fungsional yang dilantik adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama untuk DJKI dan 3 (tiga) orang Auditor Ahli Madya untuk Itjen Kemenkumham.

“Sumpah yang saudara ucapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan komitmen moral dan sikap profesional yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan amanah baik kepada diri sendiri, bangsa dan Negara dan yang utama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) sekaligus Inspektur Jenderal Kemenkumham.



Demi Peningkatan Pelayanan Publik, DJKI Gelar Lokakarya Review Maturitas Teknologi Informasi

Bandung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM meyakini bahwa perubahan teknologi informasi membawa transformasi pelayanan publik yang semakin nyaman bagi seluruh pemangku kepentingannya.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih berdaya saing dan bertaraf internasional, DJKI menggelar lokakarya Review Maturitas Teknologi Informasi di Bandung, Jawa Barat, pada 23-25 Maret 2022.

“Revolusi teknologi informasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),”

ujar Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti.

DJKI sendiri telah memiliki Dokumen IT Master Plan DJKI 2020-2024 yang di dalamnya terdapat analisa kondisi dan hasil pemahaman serta pemetaan terhadap keadaan organisasi, teknologi dan proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam Pemetaan terhadap keadaan teknologi agar dapat menjamin pemanfaatan dari implementasi Teknologi Informasi yang sudah ada saat ini, salah satu referensinya adalah Reviu Maturitas TI dengan Indeks SPBE.



DJKI Optimalkan Pengendalian Akuntabilitas Keuangan

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Konsinyasi Pengendalian Akuntabilitas Laporan Keuangan DJKI pada 31 Maret s.d 3 April 2022 di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pembahasan terkait permasalahan pengembangan aplikasi pada DJKI. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan maupun informasi sebagai upaya optimalisasi pengendalian akuntabilitas laporan keuangan.

Sekretaris DJKI, Sucipto menyampaikan dalam upaya mewujudkan World Class Intellectual Property Office untuk memberikan pelayanan kekayaan intelektual (KI) yang prima, DJKI terus berupaya melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan bersama mengenai kebutuhan pengembangan beberapa aplikasi yang mendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan, di antaranya pengembangan aplikasi SIMPAKI, pengembangan aplikasi SAKI, dan pengembangan aplikasi IPROLINE,” kata Sucipto.



Plt Dirjen KI: ASN Kemenkumham Harus Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu menegaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berorientasi pelayanan. Sebagai pelayan, seorang pegawai harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan masyarakat.

“Di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ASN harus berakhlak baik dan memiliki nilai, salah satunya menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat, pada mereka yang telah menggaji kita,” ujar Razilu pada Jumat, 1 April 2022.

“Kita harus jadi pelayan yang mau menjemput bola seperti program kita di Mobile IP Clinic di mana kita memberikan

konsultasi di daerah-daerah untuk masyarakat secara gratis,” imbuh Razilu.

Sebagai informasi, Mobile IP Clinic merupakan sebuah inovasi juga komitmen DJKI bersama seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia, dan para pemangku kepentingan daerah untuk bekerja sama membantu serta melindungi KI masyarakat di seluruh Indonesia.

Selain itu, dia juga meminta para pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Oleh karena itu, dia sangat mendukung program DJKI Aktif Belajar Mengajar yang telah dilaksanakan seluruh direktorat di lingkungannya.



DJKI Targetkan ISO untuk Teguhkan Komitmen Pelayanan Publik dan Anti-Korupsi

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu menegaskan pentingnya mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM akan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 dan standar manajemen mutu ISO 9001:2015. Tak sekedar mendapatkan sertifikat, seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan DJKI harus menjaga integritas untuk menjadi salah satu kantor KI terbaik dunia 2024.

“Bapak/Ibu lebih dari sertifikat, saya berharap penerapan sistem ini

menunjukkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terlebih agar masyarakat percaya pada integritas, produktivitas, dan moral kita sebagai pelayan publik,” ujar Razilu dalam acara Kick Off Komitmen Bersama Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kamis, 7 April 2022 di Aula Seno Aji.



DJKI Berkomitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik Melalui Pelatihan Public Speaking

Bandung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Pelatihan Public Speaking "Presentation Skills" guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mercure Bandung pada 10 s.d. 13 April 2022.

Dalam sambutannya, Sekretaris DJKI, Sucipto menjelaskan tentang pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan DJKI, seperti Mobile IP Clinic dan Roving Seminar yang dapat berlangsung baik jika SDM-nya memiliki kemampuan pemaparan yang baik.

"Public speaking yang baik sebenarnya selaras dengan tata nilai PASTI

(Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)," tutur Sucipto.

Menurut Sucipto public speaking sangatlah penting karena memiliki beberapa kekuatan yaitu untuk mengembangkan diri, mempengaruhi dunia sekitar, dan meningkatkan karir.

Sucipto menegaskan seorang pemimpin harus dibentuk melalui pelatihan-pelatihan manajerial agar mempunyai kemampuan *public speaking* yang luar biasa. Selain itu, seni berbicara di depan umum bukan hanya perlu dimiliki oleh pejabat atau pembicara publik, tetapi perlu dikuasai oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN).



DJKI Siap Capai Target Kinerja dengan Terus Meningkatkan Pelayanan Prima

Bandung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pelatihan pelayanan prima untuk pegawai di lingkungan DJKI guna memberikan kualitas pelayanan publik dan mencapai target kinerja.

Pada pelatihan yang digelar pada tanggal 20 s.d. 23 April 2021 di Grand Mercure Hotel Bandung ini, terdapat 3 (tiga) kelas di antaranya komunikasi interpersonal, pembekalan materi pelayanan prima serta dilanjutkan dengan simulasi pelayanan prima, analisa masalah serta diskusi kelompok.

Materi komunikasi interpersonal yang disuguhkan merupakan pola berkomunikasi yang terjalin antara

dua orang atau lebih secara tatap muka serta pembekalan materi pelayanan prima bertujuan untuk memberikan pegawai DJKI pengetahuan untuk dapat bersikap lebih profesional.

Tidak hanya itu, Koordinator Kepegawaian Dian Nurfitri juga menjelaskan bahwa etika dasar pelayanan adalah sikap sopan, hormat, sikap penuh perhatian, suka membantu, tenggang rasa, bersahabat serta mampu menguasai diri dan mengendalikan emosi.



Demi Meningkatkan Layanan Publik Digital yang Cepat, Tepat dan Akuntabel, DJKI Gelar Evaluasi Implementasi IT Master Plan

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan kegiatan evaluasi Implementasi IT Master Plan di Trans Resort Bali, pada Senin sampai dengan Rabu, 23 Mei - 25 Mei 2022.

Dede Mia Yusanti selaku Direktur Teknologi Informasi KI menyampaikan bahwa DJKI pada 2020 telah menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumen IT Master Plan DJKI 2020-2024.

“Penyusunan dokumen IT Master Plan DJKI 2020-2024 ini memiliki maksud dan tujuan agar kebijakan pengembangan teknologi informasi di DJKI dapat dilakukan secara sistematis dan menjadi lebih terarah

dan terintegrasi sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Dede.

Dokumen IT Master Plan berisi penjelasan kondisi saat ini, target pencapaian serta peta jalan dan dokumen enterprise architecture. Dokumen ini juga menjelaskan kondisi DJKI saat ini dan kondisi target terkait Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur keamanan serta Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen.

Kegiatan ini merupakan evaluasi untuk program Tahun 2021.



Pegawai DJKI Diimbau untuk Senantiasa Jaga Integritas dalam Bekerja

Jakarta - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto, mengimbau seluruh pegawai untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Apel Pagi, Senin, 23 Mei 2022 di Aula Oemar Seno Aji, Jakarta Selatan.

“Sekali lagi saya imbau untuk selalu menjaga integritas. Jaga apa yang harus dijaga untuk ada di internal dan eksternal,” ujarnya.

Menurut Anggoro, sangat penting untuk menjaga integritas jika menginginkan DJKI untuk menjadi salah satu kantor KI terbaik di dunia.

Sebagaimana diketahui, DJKI memiliki tujuan menjadi Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Apel pagi ini diikuti pegawai melalui kanal Zoom dan juga langsung. Pegawai juga diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan.



Implementasikan Nilai-nilai Pancasila, DJKI Berikan Pelayanan Publik Melalui Program Unggulan

Jakarta - Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 secara *Hybrid* di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham pada Rabu (1/6/2022).

Bertindak sebagai Inspektur upacara, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengenakan baju adat Ende, yakni Ragi Lambu-Luka Lesu lengkap dengan penutup kepala.

Dalam amanatnya, Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk membumikan pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur

pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DJKI selaku unit unsur pelaksana di Kemenkumham yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual siap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemberian pelayanan publik terkait perlindungan kekayaan intelektual.

Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya 16 program unggulan DJKI tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Januari 2022 lalu.



DJKI Gelar Rekonsiliasi Layanan Publik atas PNBP untuk Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Jakarta - Sebagai bentuk upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Rekonsiliasi Layanan Publik atas Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Data Layanan Triwulan I pada tanggal 1 s.d 4 Juni 2022 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“DJKI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Tentu saja dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, DJKI menjadi sebuah instansi di dalam Kemenkumham yang menghasilkan sumber pendapatan bagi negara berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak,” kata Kepala Bagian Keuangan DJKI, Cumarya dalam sambutannya.

Cumarya berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat mempercepat penyajian data terkait PNBP terhadap layanan DJKI. kegiatan ini juga sebagai bentuk antisipasi pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap laporan keuangan DJKI.

Harapannya, tidak ditemukan indikasi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya selisih antara jumlah data pelayanan dan data pembayaran kekayaan intelektual.

